



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
BBPP KETINDAN
INDONESIAN CENTER FOR AGRICULTURAL TRAINING



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

2025

Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP) Ketindan



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
2025**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP)
KETINDAN
TAHUN 2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada : (a) Peraturan Pemerintah Nomor No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga; (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan (d) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599 Tahun 2025 tentang Panduan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2025 BBPP Ketindan mengelola anggaran sebesar Rp. 12.879.168.000,- dengan capaian serapan anggaran tahun 2025 mencapai Rp. 12.870.020.987,- (99,93%) dengan tingkat efisiensi sebesar 99,73% masuk katagori “Efisien”. Untuk capaian kinerja PK 1 yaitu Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) mencapai 18,87% dari target 20,00% (presentase capaian 105,97%), rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) mencapai 17,98% dari target 25,00% (presentase capaian 139,06%). PK 2 yaitu tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan mencapai 4,57 dari target 4,00 (presentase capaian 114,25%) dengan menggunakan perhitungan skala likert 1-5, PK 3 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Ketindan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 98,66 dari target 90,00, sedangkan PK 4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan mencapai 3,75 dari target 3,60.

Kebijakan balai dalam meningkatkan PNBPN dengan adanya Rapim on the Spot (RotS) sangat berhasil hal ini dibuktikan dengan data perolehan PNBPN dari pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan tahun 2024 sebesar Rp. 8.675.000 (21,69% dari target Rp. 40.000.000) meningkat tajam dalam periode yang sama di tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 50.513.400 (105,81% dari target Rp. 47.738.000).

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu: sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi DIPA sebanyak 11 kali diantaranya dikarenakan terjadinya penambahan output kegiatan pelatihan yang bersumber pada PNBPN.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala tersebut di atas, maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi dan komunikasi internal yang lebih baik dari masing-masing fungsi yaitu fungsi perencanaan, keuangan dan monitoring agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi dalam penyerapan anggaran dapat terealisasi secara optimal dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPPSDMP selaku pemangku kebijakan.

KATA PENGANTAR



Laporan Capaian Kinerja BBPP Ketindan tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban BBPP Ketindan atas capaian sasaran kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas BBPP Ketindan kepada masyarakat dalam penggunaan APBN tahun 2025. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BBPP Ketindan tahun 2025 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja BBPP Ketindan tahun 2025 adalah hasil kerja seluruh jajaran BBPP Ketindan serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani selaku pelaku utama. Besar harapan kami Laporan Capaian Kinerja tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kinerja BBPP Ketindan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Akhir dari pengantar ini, kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan menuju swasembada pangan.

Lawang, Januari 2026
Kepala Balai

NIP. 196910232002122001
Qomariyah, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
Ikhtisar Eksklusif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi, Tata Kerja dan Tupoksi	2
1.2.1 Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Potensi dan Permasalahan	5
1.3.1 Potensi BBPP Ketindan	5
1.3.1.1 Potensi SDM Pertanian	5
1.3.1.2 Potensi Sarana dan Prasarana	8
1.3.2 Permasalahan	10
1.4 Isu Strategis	10
1.5 Aspek Strategis Organisasi	11
1.5.1 Kekuatan	11
1.5.2 Kelemahan	13
1.5.3 Peluang	13
1.5.4 Tantangan	14
1.6 Dukungan Anggaran	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis	18
2.1.1 Visi	18
2.1.2 Misi	19
2.1.3 Tujuan	19
2.1.4 Kebijakan dan Strategi	20
2.1.5 Program BBPP Ketindan	22
2.2 Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	26
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	26
3.2 Capaian Kinerja	26
3.3 Realisasi Anggaran	28
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	28
3.5 Hambatan dan Kendala	31
3.6 Rencana Aksi	32
3.7 Capaian Kinerja Lainnya	32
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Daftar Prasarana dan Sarana BBPP Ketindan Tahun 2025	8
Tabel 2. Kronologis Pagu Anggaran BBPP Ketindan Triwulan IV Tahun 2025 .	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2025	25
Tabel 4. Hasil Pengukuran kinerja BBPP Ketindan Triwulan IV Tahun 2025	27
Tabel 5. Tingkat Efisiensi Kegiatan BBPP Ketindan pada Triwulan IV Tahun 2025	30

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Ketindan berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2025	2
Gambar 2. Aparatur Sipil Negara BBPP Ketindan berdasarkan Jenis Kelamin ..	6
Gambar 3. Aparatur Sipil Negara BBPP Ketindan berdasarkan Umur	7
Gambar 4. Aparatur Sipil Negara BBPP Ketindan berdasarkan Golongan	7
Gambar 5. Aparatur Sipil Negara BBPP Ketindan berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	8

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi dan Keragaan SDM BBPP Ketindan Tahun 2025
- Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Linkup BPPSDMP Tahun 2025.
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2025
- Lampiran 4. Capaian Perjanjian Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2025
- Lampiran 5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Ketindan Tahun 2025
- Lampiran 6. Laporan Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
- Lampiran 7. Laporan Sistem Informasi dan Pengendalian (SIMDAL) Tahun 2025
- Lampiran 8. Laporan Realisasi PNBPP BBPP Ketindan Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

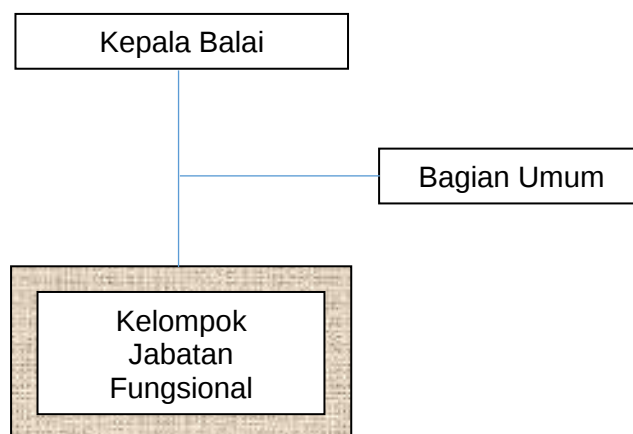
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang secara teknis di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan selaku UPT lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian mempunyai wewenang dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BPPSDMP, BBPP Ketindan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian. Sedangkan fungsi BBPP Ketindan salah satunya adalah penyusunan kebijakan teknis rencana program dan anggaran, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Sebagai salah satu instansi pemerintah maka semua pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai BBPP Ketindan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini wajib disusun sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas maka disusunlah Laporan Kinerja Capaian BBPP Ketindan tahun 2025.

1.2 Organisasi, Tata Kerja dan Tupoksi

1.2.1 Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, organisasi dan tata kerja BBPP Ketindan telah mengalami penyempurnaan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP, yang memuat antara lain : menata ulang organisai dan tata kerja UPT di bawah BPPSDMP agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi, mengakomodasi tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Menteri Pertanian dan mengatur seluruh aspek struktural dan administratif UPT — mulai dari kedudukan, susunan organisasi, jabatan (fungsional & pelaksana), penataan organisasi, hingga ketentuan peralihan. Selanjutnya dari penyempurnaan tersebut dalam teknis penerapannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.



Gambar 1.
Struktur Organisasi BBPP Ketindan
berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2025

Dengan struktur organisasi seperti di atas maka jabatan struktural di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian hanya tersisa dua yaitu

Kepala Balai (Eselon II B) dan Kepala Bagian Umum (Eselon III A), sedangkan pegawai lainnya masuk kelompok substansi dan tim kerja.

Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum, terdiri atas:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

- 1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama; dan
- 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.

b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan

- 1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur; dan
- 2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis.

c. Bagian Umum

- 1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;
- 2) Tim Kerja Keuangan; dan
- 3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu dan umum yang sudah ada di BBPP Ketindan terdiri dari :

a. Fungsional Tertentu

- 1) Widyaiswara
- 2) Perencana;
- 3) Analis SDM Aparatur;
- 4) Analis Pengelolaan Keuangan APBN;
- 5) Pranata Keuangan APBN;
- 6) Pranata Hubungan Masyarakat;
- 7) Pranata Komputer;
- 8) Arsiparis.

b. Fungsional Umum

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Penata Layanan Operasional;
- 4) Operator Layanan Operasional;
- 5) Pengadministrasi Perkantoran.

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 649 Tahun 2025, BBPP Ketindan selaku UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian, peternakan dan/atau kesehatan hewan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya, pengelolaan data dan informasi pelatihan, pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan nonaparatur di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya.

2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pelatihan, penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran, penyiapan bahan evaluasi pasca diklat, penyiapan bahan bimbingan lanjutan, penyiapan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Wilayah Bebas dari Korupsi, pengumpulan dan mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan

Mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur

Melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan non aparatur.

2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis

Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi, pemberian konsultasi dan pengelolaan inkubator agribisnis.

c. Bagian Umum

1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha

Melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

2) Tim Kerja Keuangan

Melakukan pengelolaan urusan keuangan.

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis.

1.3 Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Potensi BBPP Ketindan

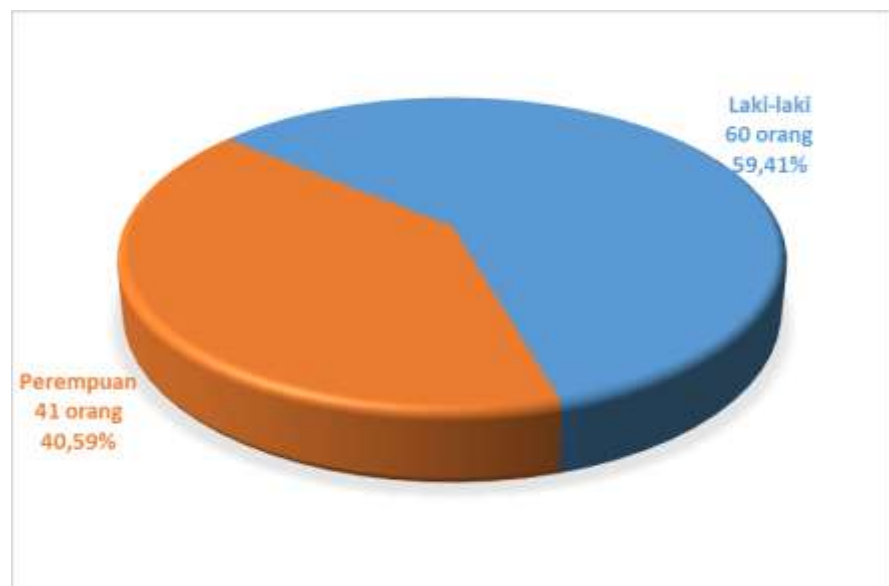
1.3.1.1 Potensi Sumberdaya Manusia Pertanian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan triwulan IV pada tahun 2025 BBPP Ketindan didukung oleh 101 pegawai yang terdiri dari 68 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 29 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 orang PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) di BBPP Ketindan sebanyak 101 (seratus satu) orang, yang terdiri atas 60 (enam puluh) orang atau 59,41% berjenis kelamin laki-laki dan 41 (empat puluh satu) orang atau 40,59% berjenis kelamin perempuan. Adapun deskripsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 2.

Gambar 2. Aparatur Sipil Negara BBPP Ketindan berdasarkan Jenis Kelamin



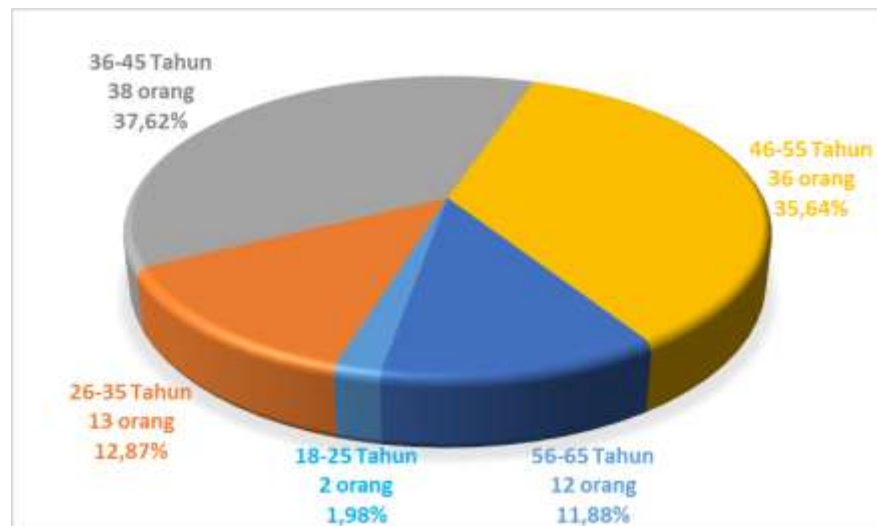
*) Data Kepegawaian dan TU BBPP Ketindan per 31 Desember 2025

2. Berdasarkan Sebaran Umur

Berdasarkan sebaran umur aparatur BBPP Ketindan mempunyai rentang umur mulai umur 18 sampai dengan 25 tahun atau sebanyak 2 orang atau 1,98%, usia antara 26 sampai dengan 35 tahun sebanyak 13 orang atau 12,87%, yang berusia antar 36 sampai dengan 45 tahun sebanyak 38 orang atau 37,62%, yang berusia antara 46 sampai dengan 55 tahun sebanyak 36 orang atau 35,64% dan yang berusia antara 56 sampai dengan 65 tahun sebanyak 12 orang atau 11,88%.

Adapun secara rinci deskripsi pegawai berdasarkan sebaran umur disajikan pada gambar 3.

Gambar 3 . ASN BBPP Ketindan berdasarkan Umur

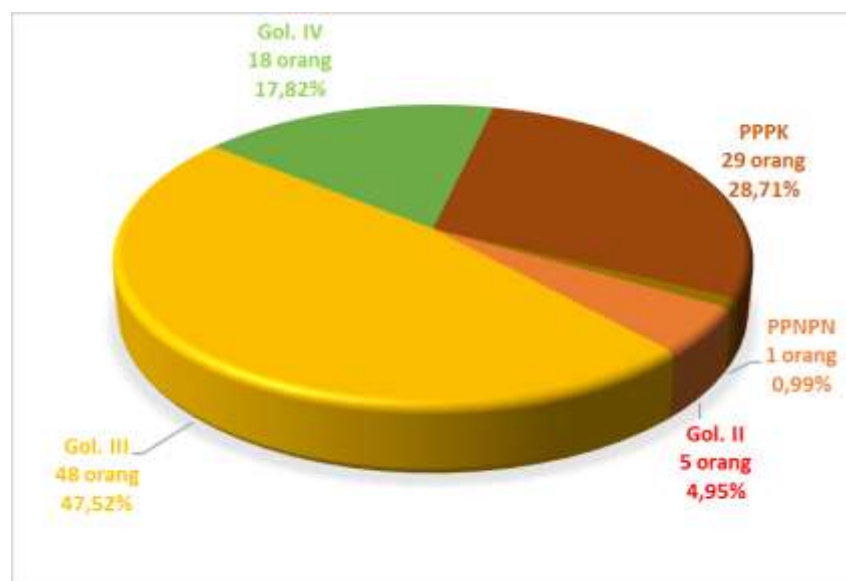


*) . Data Kepegawaian dan TU BBPP Ketindan per 31 Desember 2025

3. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, ASN di BBPP Ketindan terdiri dari golongan II sebanyak 5 orang atau 4,95%, golongan III sebanyak 48 orang atau 47,52%, golongan IV sebanyak 18 orang atau 17,82% sedangkan golongan PPPK sebanyak 29 orang atau 28,71% dan golongan PPNP sebanyak 1 orang atau 0,99%

Gambar 4. ASN BBPP Ketindan berdasarkan Golongan

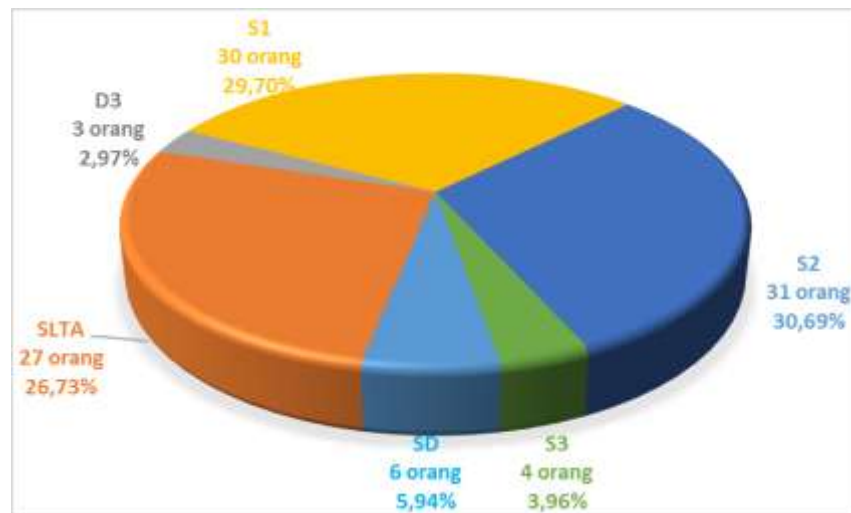


*) . Data Kepegawaian dan TU BBPP Ketindan 31 Desember 2025

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan, ASN BBPP Ketindan yang berpendidikan SD sebanyak 6 orang atau 5,94%, SLTA sebanyak 27 orang atau 26,73%, D3 sebanyak 3 orang atau 2,97%, S1 sebanyak 30 orang atau 29,70%, S2 sebanyak 31 orang atau 30,69% dan S3 sebanyak 4 orang atau 3,96%.

Gambar 5. Aparatur BBPP Ketindan berdasarkan Pendidikan



*) Data Bagian Umum dan TU BBPP Ketindan 31 Desember 2025

1.3.1.2 Potensi Sarana dan Prasarana

BBPP Ketindan berada di atas areal seluas 4,73 Ha dengan rincian, bangunan kantor dan ruang perkantoran penunjang pelatihan seluas 2,1 Ha, lahan praktek seluas 1,64 Ha serta jalan dan halaman kantor seluas 0,99 Ha.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan didukung oleh keragaan prasarana dan sarana pelatihan seperti pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar Prasarana dan Sarana BBPP Ketindan tahun 2025

No	Rincian	Jumlah/Luas	Kapasitas	Keterangan
1.	Gedung Kantor Jahe Merah	1 unit / 640 m ²	-	-
2.	Ruang Penyelenggara Pelatihan	1 unit / 200 m ²	-	-
3.	Gedung Aula Mahkota Dewa	1 unit / 371 m ²	150 orang	-
4.	Ruang Rapat AOR + Studio	1 unit / 201 m ²	-	-
5.	Kelas :			
	a. Kelas Padi	1 unit / 120 m ²	30 orang	
	b. Kelas Tapak Liman I	1 unit / 150 m ²	30 orang	
	c. Kelas Tapak Liman IV	1 unit / 150 m ²	30 orang	
	d. Kelas Tapak Liman V	1 unit / 150 m ²	30 orang	
	e. Kelas Tapak Liman VI	1 unit / 150 m ²	30 orang	

No	Rincian	Jumlah/Luas	Kapasitas	Keterangan
6.	f. Kelas Outdoor Laboratorium :	1 unit / 40 m ²		
	a. Instalasi THP Tanaman Pangan	1 unit / 200 m ²	-	-
	b. Instalasi THP Tanaman Obat	1 unit / 256 m ²	-	-
	c. Instalasi Biotek dan Kultur Jaringan	1 unit / 181,5 m ²	-	-
	d. Instalasi Proteksi Tanaman	1 unit / 169 m ²	-	-
7.	Perbenihan	1 unit / 72 m ²		
8.	Rumah Pupuk	1 unit / 40 m ²		
9.	Ruang Perpustakaan	1 unit / 42 m ²	-	-
10.	Asrama			
	a. Mawar	10 kamar / 256 m ²	20 orang	Jumlah keseluruhan kapasitas/daya tampung = 204 orang
	b. Melati	14 kamar / 490 m ²	28 orang	
	c. Manggis	6 kamar / 133 m ²	12 orang	
	d. Som Jawa	14 kamar / 410 m ²	32 orang	
	e. Buah Tin	52 kamar / 2.390 m ²	130 orang	
11.	Guest House			
	a. Kacang Tanah	1 unit / 137 m ²	8 orang	4 kamar
	b. Gandum	1 unit / 113 m ²	6 orang	4 kamar
	c. Kacang Hijau	1 unit / 85 m ²	1 orang	1 kamar
	d. Shorgum	1 unit / 113 m ²	8 orang	4 kamar
12.	Screenhouse			-
	a. Screenhouse Tanaman Obat	1 unit / 225 m ²		
	b. Screenhouse Tanaman Hias	1 unit / 120 m ²		
	c. Screenhouse Tanaman Horti	1 unit / 248 m ²		
	d. Smart Greenhouse	11 unit / 5.470 m ²		
	e. Low Cost Smart Greenhouse	1 unit / 385 m ²		
13.	Masjid	1 unit / 423 m ²	-	-
14.	Koperasi (Landbouw-Mart & LKPIA)	1 unit / 207 m ²	-	-
15.	Sport Center	1 unit / 128 m ²		
16.	Pos Satpam			
	a. Pos Jaga Depan	1 unit / 16 m ²		
	b. Pos Jaga Belakang	1 unit / 16 m ²		
17.	Rest Area	1 unit / 95 m ²		
18.	Lahan Praktek	1,1 Ha	-	
	a. Tanaman pangan	4.149 m ²		
	b. Pekarangan pangan bergizi	224 m ²		
	c. Hortikultura (buah)	1.431 m ²		
	d. Tanaman obat	1.182 m ²		
19.	Ruang Makan			
	a. Pecut Kuda	1 unit / 128 m ²	50 orang	-
	b. Gendola	1 unit / 330 m ²	100 orang	
20.	Genset/Rumah Genset	1 unit / 61 m ²	-	-
21.	Garasi:		-	-
	a. Garasi Mobil	1 unit / 130 m ²		
	b. Garasi Traktor	1 unit / 26 m ²		
	c. Garasi Alsintan	1 unit / 120 m ²		
	d. Parkiran Sepeda	1 unit / 60 m ²		
22.	Gudang	412 m ²		
23.	Kendaraan roda empat	7 unit	-	-
24.	Kendaraan roda dua	20 unit	-	-
25.	Rumah Dinas	12 unit	-	-

*) Data Bagian Umum BBPP Ketindan 31 Desember 2025

1.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan non aparatur pertanian sebagai berikut:

- Sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi DIPA sebanyak 11 kali terkait penambahan target dan penggunaan PNBP terkait pelatihan dan sertifikasi.
- Beberapa pelatihan yang bersumber dari kerjasama PNBP mengalami kendala untuk segera dilaksanakan dikarenakan revisi di tingkat pusat yang tidak dapat dipastikan jadwal penyelesaian revisi DIPA-nya.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis pada BBPP Ketindan dalam kurun waktu 2025-2029, antara lain :

1.4.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan, yaitu :

- Implementasi dan pengembangan penjaminan mutu pelatihan oleh UPT pelatihan;
- Tersedianya sistem informasi, promosi dan publikasi setiap tahun;
- Kualitas manajemen melalui ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016;
- Memberikan citra pelayanan prima, sebagai bentuk apresiasi institusi pemerintah yang melayani kepada masyarakat.

1.4.2 Peningkatan kapasitas tenaga kediklatan pertanian, yaitu :

- Tersedianya tenaga kediklatan dalam jumlah proporsional dan memiliki kapasitas manajerial;
- Tersedianya tenaga kediklatan yang telah mengikuti *Training Officer Course (TOC)* dan *Management of Training (MOT)*;
- Meningkatnya kompetensi widyaiswara sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;

1.4.3 Peningkatan Sistem Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yaitu :

- Meningkatnya kompetensi 4.311 orang melalui pelatihan teknis, vokasi, kewirausahaan dan fungsional yang bersumber pada DIPA

reguler dan PNPB untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian;

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektif dan efisien pelaksanaan kediklatan;
- Pengawasan dan pendampingan program Kementerian Pertanian untuk mendukung program utama pembangunan pertanian.

1.4.4 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian, yaitu :

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan kerjasama pelatihan/magang bagi aparatur/non aparatur dan kerjasama penyediaan sarana prasarana/kunjungan/studi banding;
- Meningkatkan promosi, publikasi dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai jenis media informasi seperti pameran, media cetak, elektronik, diorama, display dan lain-lain;
- Tersusunnya perencanaan pelatihan sesuai program;
- Terselenggaranya pelatihan/permagangan bertaraf internasional;
- Terselenggaranya kerjasama pelatihan/kemitraan dan fasilitas Balai;
- Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan dengan instansi terkait.

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis, terdiri dari aspek strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif maupun negatif. Aspek internal positif, yaitu kekuatan (*strength*) dan lingkungan internal negatif, yaitu kelemahan (*weaknesses*), sedangkan aspek eksternal positif, yaitu peluang (*opportunities*) dan aspek eksternal negatif, yaitu tantangan (*threats*). Secara rinci kelompok komponen tersebut, adalah :

1.5.1 Kekuatan (*Strength*)

- a. Memiliki program pelatihan berbasis kompetensi / *Competency Based Training* (CBT);
- b. Telah terakreditasinya 2 pelatihan BBPP Ketindan oleh LAN, yaitu : Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu dan Ubi Jalar dan Pelatihan Tanaman Obat Sebagai Pestisida dengan kualifikasi “A (Sangat Baik)”;

- c. Mempunyai keahlian dan pengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan teknis kerjasama luar negeri dibidang tanaman obat dan tanaman pangan;
- d. Mempunyai keahlian menyelenggarakan pelatihan fungsional untuk penjenjangan karir penyuluh pertanian dan Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP);
- e. Mempunyai sarana dan prasarana utama pelatihan, yaitu :
 - Terdapatnya 4 (empat) unit instalasi laboratorium yaitu laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (THP) tanaman pangan, laboratorium THP tanaman obat, laboratorium bioteknologi dan kultur jaringan, serta laboratorium proteksi tanaman;
 - *Screen house* (hidroponik dan aeroponik), *Smart Green House* (SGH) dan lahan praktek;
 - Sarana kelas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara paralel 5 - 6 kegiatan;
 - Asrama dengan kapasitas 204 orang dan ruang makan dengan kapasitas 150 orang;
 - Fasilitas *sport center*.
- f. Kompetensi widyaiswara di berbagai ilmu pertanian yang berasal dari institusi pendidikan dalam dan luar negeri baik secara formal atau informal yang terbagi kedalam 5 (lima) bidang pengampuhan, yaitu budidaya, teknologi pengolahan hasil pertanian, hama dan penyakit tanaman, penyuluhan pertanian serta sosial ekonomi pertanian;
- g. Pola, desain dan metodologi pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan sasaran calon peserta;
- h. Jejaring kerjasama yang baik dengan lembaga, instansi, praktisi dan petani sukses, digunakan sebagai lokasi praktek lapangan maupun magang serta narasumber/fasilitator/instruktur;
- i. Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) sertifikasi profesi bagi penyuluh pertanian / PP - PNS dan sertifikasi bagi petani.
- j. Mempunyai tenaga penyelenggara pelatihan yang tersertifikasi *Management of Training* (MOT) dan *Training of Course* (TOC) oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN);

- k. Bimbingan berkelanjutan terhadap alumni pelatihan dan pengukuran tingkat penerapan materi pelatihan serta solusi terhadap kendala penerapan materi;
- l. Memiliki kualitas manajemen kediklatan terstandar internasional yaitu ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016;
- m. Penggunaan website sudah merata di Balai sehingga memungkinkan untuk pengembangan pelatihan berbasis Informasi Teknologi (IT).
- n. Inovasi teknologi dan efisiensi kegiatan, berupa pengembangan aplikasi berbasis IT untuk menunjang aktivitas sehari-hari, antara lain e-learning, e-Monev, SRIKANDI, SIPEPSI, Halowid, Lapor Pak, dan *Cold Storage (K-SMART)*.

1.5.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Belum seluruh pelatihan, dilaksanakan dengan metoda/pola pelatihan berbasis kompetensi *competency based training* (CBT), sehingga pengembangan model pelatihan belum maksimal;
- b. Penataan pengembangan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu pada *Master Plan* dan *Road Map* pengembangan balai;
- c. Belum proporsionalnya jumlah sumberdaya manusia yang menyelenggarakan pelatihan dengan tenaga/sumberdaya manusia penunjang kediklatan;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan serta belum optimalnya pembaruan kurikulum dan materi pelatihan sesuai perkembangan teknologi pertanian sehingga mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran;
- e. Belum terstandarnya/terakreditasinya 4 (empat) laboratorium yang ada di BBPP Ketindan;

1.5.3 Peluang (*Opportunities*)

- a. Masih banyaknya sasaran kegiatan dan peserta pelatihan baik aparatur dan non aparatur serta generasi muda pertanian yang memerlukan pelatihan;
- b. Kebutuhan terhadap tenaga yang tersertifikasi oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertanian dalam rangka menghadapi globalisasi;

- c. Masih banyaknya penyuluh pertanian dan tenaga fungsional RIHP lainnya untuk meningkatkan jenjang karirnya melalui pelatihan fungsional yang harus diikuti sebagai persyaratannya;
- d. Banyaknya *stakeholder* yang ingin bekerjasama dalam hal pelatihan teknis, profesi dan fungsional serta magang keahlian baik di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura maupun lainnya;
- e. Adanya lembaga diklat daerah, Balai Diklat Pertanian (BDP) dan lembaga pelatihan/magang swadaya (P4S) yang menjadi binaan/mitra, untuk dikembangkan dan diberdayakan.

1.5.4 Tantangan (*Threats*)

- a. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian karena berdampak terhadap lingkungan, produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Disamping itu petani masih sangat minim memahami proses adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak sistemik. Kurangnya informasi tentang perubahan iklim dapat menghambat optimalisasi hasil produk pertanian dalam skala makro, sehingga sering mengalami resiko gagal panen;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan sumberdaya penyelenggara pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat nasional dan internasional;
- c. Adanya tuntutan peningkatan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi melalui kualifikasi manajemen yang akuntabel;
- d. Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional diluar tenaga fungsional widyaiswara;
- e. Perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di sektor pertanian menjadi tantangan utama yang menuntut kesiapan BBPP Ketindan untuk melakukan penyesuaian program secara cepat dan tepat. Dinamika regulasi serta penetapan target kinerja yang terus berkembang berimplikasi pada perlunya fleksibilitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan

1.6 Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian tahun 2025, BBPP Ketindan memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 12.879.168.000,-, yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan BBPP Ketindan. Anggaran tersebut mengalami beberapa perubahan seiring dengan perubahan anggaran di Kementerian Pertanian sehingga sampai dengan triwulan IV tahun 2025 BBPP Ketindan telah melakukan 11 (sebelas) kali revisi DIPA. Adapun kronologis perkembangan alokasi pagu BBPP Ketindan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Kronologis pagu anggaran BBPP Ketindan Triwulan IV Tahun 2025

No.	Uraian	Revisi DIPA
1.	Pagu awal dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 tertanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 10.713.896.000,-	0
2.	Pada tanggal 3 Januari 2025 dilakukan revisi karena adanya Pembukaan blokir anggaran kecuali akun anggaran perjalanan dinas terdiri dari : - Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dengan pagu Rp. 969.677.000,- - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan pagu Rp. 9.744.219.000,-	1
3.	Pada tanggal 19 Februari 2025 dilakukan revisi karena adanya penambahan target dan anggaran pada output/KRO Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 1.355.791.000,- serta Efisiensi Anggaran dimana alokasi semua anggaran perjalanan masih terblokir 50%, sehingga Pagu Anggaran BBPP Ketindan menjadi Rp. 12.069.687.000,-	2
4.	Pada tanggal 25 Maret 2025 dilakukan revisi karena adanya pembukaan blokir anggaran perjalanan dan lainnya terdiri dari: - Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian sebesar Rp. 288.175.000 + Rp. 56.612.000,- - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar Rp. 370.029.000,-	3

No.	Uraian	Revisi DIPA
5.	Pada tanggal 23 April 2025 dilakukan revisi berupa : - Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA, penyelesaian gaji ke 13 minus dan pengalokasian Layanan Dukungan Pelatihan Aparatur sebesar Rp. 132.854.000,- yang berasal dari optimalisasi TOT Alsintan	4
6.	Pada tanggal 11 Juli 2025 dilakukan revisi berupa : - Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA dan penyelesaian gaji PPPK tahap I yang diambilkan dari eksisting gaji PNS.	5
7.	Pada tanggal 8 September 2025 dilakukan revisi berupa : - Revisi DIPA dalam rangka penambahan target penggunaan PNPB dengan menambahkan KRO Sertifikasi Profesi dan SDM sebesar Rp. 159.100.00,- sebanyak 2 angkatan 65 orang yang diperuntukan untuk Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mimika.	6
8.	Pada tanggal 19 September 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam rangka penambahan gaji untuk CPNS dan PPPK Tahap 1 sebesar Rp. 240.506.000,- dan pemindahan honor Satpam dan Pengemudi serta Honor Kebersihan dan Pramubakti sebesar Rp. 81.280.000,- ke belanja gaji (001)	7
9.	Pada tanggal 14 Oktober 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA dan optimalisasi sisa kegiatan.	8
10.	Pada tanggal 28 November 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam rangka penambahan gaji untuk PNS, CPNS dan PPPK Tahap 2 sebesar Rp. 212.477.000,- dan pemindahan honor Satpam dan Pengemudi serta Honor Kebersihan dan Pramubakti sebesar Rp. 107.460.000,- ke belanja gaji (001)	9
11.	Pada tanggal 8 Desember 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam rangka penambahan target penggunaan PNPB yaitu; - Pelatihan Agribisnis dan Urban Farming (Manokwari) sebanyak 15 orang sebesar Rp. 107.070.000,-	10

No.	Uraian	Revisi DIPA
	- Sertifikasi Fasilitator Organik sebanyak 15 orang sebesar Rp. 42.054.000,- - Sertifikasi Manajemen Agribisnis sebanyak 15 orang sebesar Rp. 42.054.000,- - Pelatihan Metodologi Penyuluh Pertanian bagi P4S (Kab. Bojonegoro) sebanyak 15 orang sebesar Rp. 40.635.000,- - Sertifikasi Penyuluh Pertanian (Kab. Bojonegoro) sebanyak 15 orang sebesar Rp. 33.540.000,- - Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelatihan (Water heater dan AC) sebesar Rp. 88.602.000,-	
12.	Pada tanggal 11 Desember 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam rangka pemutakhiran data POK tahun 2025 dan optimalisasi sisa kegiatan.	11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan tahun 2025-2029 disusun dengan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi BBPP Ketindan selama 5 tahun kedepan (2025-2029) adalah “Menjadi lembaga pelatihan terpercaya, terbaik dan *centre of excellent* untuk meningkatkan SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045”.

Berdasarkan visi BBPP Ketindan 2025 – 2029 di atas, terdapat 6 (enam) kata kunci adalah Lembaga pelatihan terpercaya, *centre of excellence*, SDM pertanian yang produktif, SDM pertanian yang maju, SDM pertanian yang mandiri dan SDM pertanian sejahtera, untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Lembaga pelatihan terpercaya, BBPP Ketindan menjadi lembaga pelatihan yang mampu mencetak alumni pelatihan/purnawidya serta meningkat kompetensinya. Hal ini sesuai dengan janji pelayanan BBPP Ketindan “Memberikan jaminan kepastian layanan yang berkualitas dan profesional untuk meningkatkan SDM dan mutu pelayanan sesuai dengan standar dan mekanisme yang telah ditetapkan”.

Centre of excellence, BBPP Ketindan ke depan ingin menjadi pusat layanan unggulan di bidang pelatihan pertanian.

SDM pertanian yang produktif, SDM pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

SDM pertanian yang maju, SDM pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

SDM pertanian yang mandiri, SDM pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan

tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.

SDM pertanian yang sejahtera, SDM pertanian yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan program pelatihan pertanian yang berkualitas, adaptif dan berstandar nasional maupun internasional;
- b. Meningkatkan kompetensi, keterampilan dan daya saing peserta melalui kurikulum berbasis kompetensi kerja dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
- c. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pertanian berkelanjutan;
- d. Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berdaya saing;
- e. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi pertanian;
- f. Memantapkan tata kelola reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.

2.1.3 Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Ketindan selama lima tahun kedepan, adalah :

- a. Meningkatnya kualitas program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing dengan penyediaan sistem informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima;
- b. Meningkatnya kualitas dan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian internal secara akurat, kredibel dan akuntabel;

- c. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- d. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) .
- e. Meningkatnya kompetensi ketenagaan yang berdaya saing dan bermartabat;
- f. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

2.1.4 Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2025-2029, maka ditetapkan:

- a. Kebijakan Balai
 - Mendukung program Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan dengan kegiatan pengawalan dan pendampingan Luas Tambah Tanam serta pembentukan Brigade Pangan yang ditunjang dengan kegiatan pelatihan teknis.
 - Pelatihan yang lebih difokuskan pada penumbuhan pengusaha pertanian milenial
 - Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah, ekspor dan substitusi import;
 - Pelatihan diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian;
 - Pelatihan non aparatur pertanian diarahkan pada peningkatan kompetensi yang berdaya saing dengan jalan menitikberatkan pelatihan yang berbasis vokasi;
 - Pelatihan diarahkan pada penguatan kemitraan antara petani dan pelaku / pengusaha pengolahan dan pemasaran dan

aksesibilitas terhadap teknologi, sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar;

- Penyediaan sarana prasarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan pelatihan yang baik.
- Pelaksanaan kegiatan Rapim on the Spot (RotS) dengan membagi pengelolaan lahan kepada masing-masing bidang sehingga dapat meningkatkan PNBK;
- Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
- Peningkatan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Pelatihan.

b. Strategi Balai

- Standarisasi mutu pelayanan kediklatan, melalui akreditasi Lembaga Pelatihan sesuai ISO 9001:2015, Manajemen Anti penyuapan melalui ISO 37001:2016 ;
- Pengawasan dan pendampingan Luas Tambah Tanam dan Brigade Pengan dengan melaksanakan koordinasi baik secara online maupun pendampingan langsung di lapangan serta pembentukan *Lesson Officer* (LO) yang bertanggung jawab pada masing-masing kabupaten;
- Pengembangan dan pemberdayaan P4S dengan klasifikasi, pembinaan dan penguatan P4S guna memperkuat kelembagaan pelatihan di perdesaan.
- Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan, dengan peningkatan profesionalisme widyaiswara dan petugas melalui magang, workshop, seminar, kajian dalam dan luar negeri termasuk;
- Sertifikasi tenaga kediklatan melalui MOT dan TOC;
- Pemantapan sistem pelatihan berbasis kompetensi, yang mendukung swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan, dengan sistem CBT sesuai SKK dan SKKNI.

c. Strategi Pelayanan Kerjasama

- Peningkatan kinerja pelayanan kerjasama (kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan) sesuai tugas fungsi aparatur lingkup BBPP;

- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan kerjasama;
- Penilaian indeks kepuasan masyarakat secara periodik;
- Standarisasi persyaratan pelayanan teknis dan administrasi kerjasama yang diperlukan;
- Penetapan biaya pelayanan kerjasama yang transparan, akurat dan akuntabel;
- Peningkatan kenyamanan sarana prasarana dan keamanan lingkungan;
- Penyiapan pelatihan kerjasama internasional yang lebih baik dan berdaya saing.

2.1.5 Program dan Kegiatan BBPP Ketindan

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pertanian 2025-2029 salah satunya yaitu : Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia pertanian, maka BPPSDMP menetapkan sasaran strategisnya sebagai berikut : 1) Meningkatnya kompetensi dan daya saing sumber daya manusia pertanian; 2) Meningkatnya kualitas dan kinerja penyuluhan pertanian; 3) Meningkatnya jumlah dan kualitas petani milenial serta wirausaha muda pertanian; 4) Meningkatnya kinerja lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian dan 5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola BPPSDMP.

Berdasarkan sasaran strategis diatas BBPP Ketindan mengacu pada fungsi ekonomi program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Program Meningkatnya kualitas dan kinerja penyuluhan pertanian; dan Meningkatnya jumlah dan kualitas petani milenial serta wirausaha muda pertanian, yang diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi para penyuluh pertanian (2) Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial dengan pembentukan Brigade Pangan (3) Pelatihan mendukung Program Utama Kementerian Pertanian. Tiga kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan pemanfaatan teknologi informasi penyuluh pertanian dalam mendukung efektivitas penyuluhan dan pendampingan petani serta

upaya penilaian dan pengakuan formal terhadap kompetensi penyuluh pertanian sesuai standar kompetensi kerja yang berlaku, sebagai dasar penjaminan mutu, profesionalisme, dan kinerja penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. BBPP Ketindan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyuluh pertanian, antara lain 1) *Training Of Trainer (TOT)* Alsitan Bagi Penyuluh Pertanian; 2) Pelatihan Dasar Bagi Penyuluh Pertanian Ahli. Pelatihan tersebut bertujuan antara lain sebagai berikut : 1) meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial penyuluh pertanian agar mampu melaksanakan fungsi penyuluhan secara profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan petani; 2) memperkuat kemampuan penyuluh dalam mentransfer inovasi dan teknologi pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani; 3) meningkatkan kapasitas penyuluh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian secara sistematis dan berbasis data; 4) mendorong peningkatan kualitas pendampingan kepada petani dan pelaku usaha pertanian, termasuk petani milenial dan kelompok tani, guna mendukung pengembangan agribisnis dan kewirausahaan pertanian; 5) meningkatkan kemampuan penyuluh dalam pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi penyuluhan, sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan diseminasi informasi pertanian; dan 6) mendukung terwujudnya sistem penyuluhan pertanian yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian nasional

2. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial

Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan kemajuan Indonesia ke depan. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial bertujuan untuk 1) Meningkatkan minat generasi muda pertanian untuk berusahatani; 2) Menciptakan pengusaha pertanian yang adaptif terhadap perubahan teknologi yang modern; 3) Penciptaan lapangan kerja; dan 4) Regenerasi Petani.

Penumbuhan pengusaha pertanian milenial BBPP Ketindan diimplementasikan melalui 1) Pembentukan dan pendampingan Brigade Pangan; 2) Pelatihan penyiapan tenaga kompeten Brigade Pangan, yang sampai Tri Wulan IV ini telah terlatih 4.230 orang Brigade Pangan.

3. Pelatihan mendukung Program Utama Kementerian Pertanian

Program utama Kementerian pertanian antara lain yaitu : Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan. Penyiapan SDM melalui penyuluhan dan pelatihan untuk mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, meliputi : 1) Penguatan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pengguna; 2) Peningkatan mutu kurikulum, metode, dan widyaiswara; 3) Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pelatihan; 4) Peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pembangunan pertanian; 5) Penguatan reformasi birokrasi dan sistem manajemen kinerja balai.

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN&RB) No. 53/2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No. 20/2025 dan Permen PAN&RB No. 88/2021 tersebut, perjanjian kinerja BBPP Ketindan tahun 2025 berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau dan dikumpulkan.

Dari uraian tersebut diatas, maka dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BBPP Ketindan merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala BBPP Ketindan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Adapun PK BBPP Ketindan Tahun 2025 tersaji pada tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20 %
		Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4,00 Skala Linkert (1-5)
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Ketindan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Ketindan	90 Nilai
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan	3,60 Skala Linkert (1-4)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi.

Gambaran kinerja BBPP Ketindan triwulan IV Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktifitas, sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II menggunakan *lag indicator*.

3.2 Capaian Kinerja

BBPP Ketindan telah menetapkan standar kinerja BBPP Ketindan pada awal tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra BBPP Ketindan tahun 2025 - 2029. Standar tersebut dituangkan dalam bentuk

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai yang berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Evaluasi kinerja BBPP Ketindan tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja BBPP Ketindan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja BBPP Ketindan pada triwulan IV tahun 2025 secara ringkas disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengukuran kinerja BBPP Ketindan Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20 %	18,87%
		Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25 %	17,98%
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4,00 Skala Linkert (1-5)	4,57
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Ketindan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Ketindan	90 Nilai	98,66
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan	3,60 Skala Linkert (1-4)	3,75

Berdasarkan pengukuran kinerja yang tersaji pada tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) sampai dengan triwulan IV rata-rata indeks

kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) terealisasi 18,87% (melampaui target yang ditetapkan) dan rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) terealisasi 17,98% % (melampaui target yang ditetapkan). Hal ini menunjukkan keberhasilan pelatihan yang telah dilaksanakan.

2. Penilaian terhadap kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian sampai dengan triwulan IV mencapai nilai 4,57. Dari nilai ini terlihat bahwa evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan sudah melampaui target, perhitungan nilai capaian menggunakan perhitungan 5 skala likert mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pertanian Nomor : 137/Kpts/SM. 120/I/08/2024.
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Ketindan yang didasarkan pada hasil aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) Kementerian Keuangan menunjukkan nilai kinerja 98,66 sehingga target yang telah ditetapkan tercapai.
4. Penilaian terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan sampai dengan triwulan IV mencapai nilai 3,75 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pelayanan publik BBPP Ketindan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kebijakan balai dalam meningkatkan PNBP dengan adanya Rapim on the Spot (RotS) sangat berhasil hal ini dibuktikan dengan data perolehan PNBP dari pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 8.675.000 (21,69% dari target Rp. 40.000.000) meningkat tajam dalam periode yang sama di tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 50.513.400 (105,81% dari target Rp. 47.738.000).

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2025, BBPP Ketindan memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp. 2.789.426.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 10.089.742.000,-. Sehingga total anggaran tahun 2025 adalah sebesar

Rp.12.879.168.000,- dan hingga triwulan IV, realisasi serapan anggaran BBPP Ketindan sebesar Rp. 12.870.020.987,- atau 99,93%.

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (proporsi output/input). Tingkat kriteria efisiensi, adalah sebagai berikut : $\geq 100\%$ kategori “Sangat Efisien” artinya “Output melebihi target dengan penggunaan sumber daya sesuai atau lebih rendah”, $90\% - < 100\%$ kategori “Efisien” artinya “Target tercapai dengan penggunaan sumber daya optimal”, $80\% - < 90\%$ “Cukup Efisien” artinya “Target hampir tercapai, terdapat ruang perbaikan”, $70\% - < 80\%$ “Kurang Efisien” artinya “Target belum optimal, perlu peningkatan efisiensi” dan $< 70\%$ “Tidak Efisien” artinya “Penggunaan sumber daya belum efektif dan efisien”.

Untuk menghitung capaian tingkat efisiensi dihitung berdasarkan capaian fisik dan keuangan program dan kegiatan BBPP Ketindan pada triwulan IV tahun 2025, baik secara global maupun secara parsial menurut masing-masing output. Capaian efisiensi tersebut disajikan pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Tingkat efisiensi kegiatan BBPP Ketindan pada triwulan IV tahun 2025

No.	Output	Anggaran			Fisik			Tingkat Efisiensi
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)	
1.	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	550.000.000	549.747.480	99,95	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100,00	100,05
2.	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	356.240.000	355.938.750	99,92	1 Unit	1 Unit	100,00	100,08
3.	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	276.748.000	275.964.702	99,72	110 Orang	108 Orang	98,18	98,45
4.	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.606.438.000	1.606.056.478	99,98	4.311 Orang	4.311 Orang	100,00	100,02
5.	Layanan perkantoran	10.089.742.000	10.082.313.577	99,92	1 Layanan	1 Layanan	100,00	100,05
TOTAL		12.879.168.000	12.870.020.987	99,93			99,63	99,73

Mencermati tabel 5, dapat dijelaskan bahwa secara global capaian kinerja BBPP Ketindan pada triwulan IV tahun 2025 termasuk kategori “Efisien” yang ditunjukkan dengan nilai 99,73%, artinya target tercapai dengan penggunaan sumber daya yang ada di BBPP Ketindan optimal.

- Pada output “*Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan*” secara anggaran terealisasi 99,95% sedangkan secara fisik terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan 7 output kegiatan, sedangkan realisasi fisiknya 7 kegiatan, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 100,05%.
- Pada Output “*Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup*” secara anggaran terealisasi 99,92% sedangkan secara fisik terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan 1 unit kegiatan, sedangkan realisasi fisiknya 1 kegiatan, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 100,08%.
- Pada Output “*Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian*” secara anggaran terealisasi 99,72% sedangkan secara fisik terealisasi 98,18%. Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan target 110 orang, sedangkan realisasi fisiknya 108 orang, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 98,45%.
- Pada output “*Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan*” secara anggaran terealisasi 99,98% sedangkan secara fisik terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan 4.311 orang, sedangkan realisasi fisiknya 4.311 orang, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 100,02%.
- Output terakhir yaitu “*Layanan perkantoran*” secara anggaran terealisasi 99,92% sedangkan secara fisik terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan 1 layanan, sedangkan realisasi fisiknya 1 layanan, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 100,05%.

3.5 Hambatan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sudah berjalan lancar, namun masih mengalami hambatan/kendala, yaitu:

1. Sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi DIPA sebanyak 11 kali diantaranya dikarenakan terjadinya penambahan output kegiatan pelatihan yang bersumber pada PNBP.

2. Beberapa pelatihan yang bersumber dari kerjasama PNBP kurang cepat pelaksanaannya dikarenakan revisi di tingkat pusat yang tidak dapat dipastikan jadwal penyelesaian revisi DIPA-nya.

3.6 Rencana Aksi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya dan tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yaitu :

1. Mempersiapkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber dari PNBP dengan baik dan cermat.
2. Koordinasi dan pemantauan yang terus menerus dengan BPPSDMP untuk menindaklanjuti segera terkait dengan revisi DIPA yang sedang dalam proses baik kegiatan yang bersumber dari kerjasama PNBP maupun reguler.

3.7 Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang dicapai BBPP Ketindan di Tahun 2025 antara lain :

1. Inovator “Micessla” sebagai peserta kompetisi inovasi pelayanan publik Tahun 2025 Kementerian Pertanian;
2. Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan predikat “informatif” Lingkup Eselon II Kementerian Pertanian;
3. Peringkat VIII Petugas PPID Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kementerian Pertanian.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BBPP Ketindan tahun 2025, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPP Ketindan selama kurun waktu tahun 2025. Pada tahun bersangkutan, BBPP Ketindan mempertanggungjawabkan target-target pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kepala BBPP Ketindan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun 2025 BBPP Ketindan mengelola anggaran sebesar Rp. 12.879.168.000,- dengan capaian serapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2025 mencapai Rp. 12.870.020.987,- (99,93%) dengan tingkat efisiensi sebesar 99,73% masuk katagori “Efisien”. Untuk capaian kinerja PK 1 yaitu Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) mencapai 18,87% dari target 20,00% (presentase capaian 105,97%), rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) mencapai 17,98% dari target 25,00% (presentase capaian 139,06%). PK 2 yaitu tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan mencapai 4,57 dari target 4,00 (presentase capaian 114,25%) dengan menggunakan perhitungan skala likert 1-5, PK 3 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Ketindan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 98,66 dari target 90,00, sedangkan PK 4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan mencapai 3,75 dari target 3,60.

Kebijakan balai dalam meningkatkan PNBPN dengan adanya Rapim on the Spot (RotS) sangat berhasil hal ini dibuktikan dengan data perolehan PNBPN dari pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 8.675.000 (21,69% dari target Rp. 40.000.000) meningkat tajam dalam periode yang sama di tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 50.513.400 (105,81% dari target Rp. 47.738.000).

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di BBPP Ketindan sampai dengan triwulan IV pada tahun 2025, adalah : 1) Sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi DIPA sebanyak 11 kali diantaranya

dikarenakan terjadinya penambahan output kegiatan pelatihan yang bersumber pada PNB; 2) Beberapa pelatihan yang bersumber dari kerjasama PNB tidak dapat segera dilaksanakan dikarenakan revisi di tingkat pusat yang tidak dapat dipastikan jadwal penyelesaian revisi DIPA-nya.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada maka langkah antisipasi yang dapat dilakukan adalah : 1) Mempersiapkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber dari PNB dengan baik dan cermat; 2) Koordinasi dan pemantauan yang terus menerus dengan BPPSDMP untuk menindaklanjuti segera terkait dengan revisi DIPA yang sedang dalam proses baik kegiatan yang bersumber dari kerjasama PNB maupun reguler.